

Patriarki yang Bertemu di Persimpangan: Relasi antara Budaya Lokal dan Agama dalam Membentuk Kuasa atas Perempuan

Marthinus Nomasu Nuniary,¹ Mellisya Simon,² Ishak Dipong,³ Vira Sarimolle⁴

Institut Agama Kristen Negeri Ambon (IAKN Ambon)^{1,2,3,4}

marthinusnomasununiary@gmail.com

Abstract

This article examines how patriarchy is formed and maintained through the intersection of local culture and religion, simultaneously creating and strengthening power over women. The research problem is formulated as follows: how the collaboration of cultural values and religious legitimacy strengthens patriarchal structures, and how this impacts the restrictions on women's freedom of movement and rights. This research uses a qualitative method with a literature study approach to examine the construction of patriarchy in the context of local culture and religion. The results show that patriarchy does not exist as a single construct, but rather as a network of power reinforced by cultural practices and uncritical religious interpretations. These two systems support each other, resulting in long-lasting gender inequality. In conclusion, culture and religion need to be critically reread to open up space for liberation. This article offers a discourse on cultural-religious interpretations and strategies to dismantle patriarchal domination and build just, equal, and liberating relationships for women.

Keywords: Patriarchy; Local; Culture; Religion; Power; Women; Social; Relations.

Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana patriarki terbentuk dan dipertahankan melalui persinggungan budaya dan agama lokal, yang secara bersamaan menciptakan dan memperkuat kekuasaan atas perempuan. Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: bagaimana kolaborasi nilai-nilai budaya dan legitimasi agama memperkuat struktur patriarki, dan bagaimana hal ini berdampak pada pembatasan kebebasan bergerak dan hak-hak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji konstruksi patriarki dalam konteks budaya dan agama lokal. Hasilnya menunjukkan bahwa patriarki tidak hadir sebagai sebuah konstruksi tunggal, melainkan sebagai jaringan kekuasaan yang diperkuat oleh praktik-praktik budaya dan interpretasi agama yang tidak kritis. Kedua sistem ini saling mendukung, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan gender yang berkepanjangan. Kesimpulannya, budaya dan agama perlu dibaca ulang secara kritis untuk membuka ruang bagi pembebasan. Artikel ini menawarkan wacana tentang interpretasi budaya-agama dan strategi untuk membongkar dominasi patriarki dan membangun hubungan yang adil, setara, dan membebaskan bagi perempuan.

Kata Kunci: Patriarki, Budaya Lokal, Agama, Kuasa atas Perempuan, Relasi Sosial.

PENDAHULUAN

Masalah patriarki terkait persoalan sosial yang sampai sekarang ini di perdebatkan dalam masyarakat dan ruang akademik. Di tingkat masyarakat, perdebatan muncul karena beberapa kelompok memandang patriarki sebagai bagian alami dari tradisi dan tatanan sosial. Mereka percaya bahwa peran perempuan yang terbatas bersifat "alami" dan harus dipertahankan. Namun, kelompok lain, terutama generasi muda, aktivis perempuan, dan kalangan pendidikan, mengkritik bahwa nilai-nilai budaya sering dimanipulasi untuk mempertahankan dominasi laki-laki. Perdebatan ini muncul dalam praktik sehari-hari seperti pembagian kerja rumah tangga, hak kepemimpinan perempuan, aturan adat, dan bahkan praktik keagamaan. Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam berbagai struktur masyarakat. Sistem ini dipahami tidak hanya sebagai pola hubungan yang mengutamakan laki-laki, tetapi juga sebagai konstruksi kekuasaan berlapis yang beroperasi melalui berbagai aspek kehidupan sosial. Patriarki beroperasi melalui budaya, praktik sehari-hari, dan legitimasi agama, sehingga menjadikannya persisten dan sulit dibongkar tanpa

pemeriksaan kritis. Bagi kalangan masyarakat, patriarki merupakan sebuah kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun, dan bekerja melalui institusi budaya, tradisi dalam masyarakat, legitimasi keagamaan membentuk pola relasi melalui nilai-nilai adat yang mengutamakan otoritas laki-laki baik dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini menciptakan sebuah penetapan dalam masyarakat bahwa itu merupakan kodrat dari perempuan terhadap laki-laki, yang sebenarnya bisa digugat kembali.¹

Proses negosiasi dan penerimaan hubungan budaya dan agama sebenarnya tidaklah netral. Beberapa norma dalam masyarakat yang mengatur dan memperkuat sistem patriarki dalam masyarakat yaitu norma agama dan norma adat, yang mengatur kepatuhan istri kepada suami baik dalam keluarga dan masyarakat, yang berakibat praktik-praktik keagamaan juga memperlihat sisi keagamaan dan ajaran teologis yang memperkuat nilai budaya dalam sistem patriarki. Situasi ini menjelaskan agama bukan hanya merupakan ruang spiritual, tetapi merupakan sebuah instrumen yang mengakui budaya lokal yang terus mengekang perempuan.² Perjumpaan nilai

¹ Sylvia Walby, "Theorizing Patriarchy," *Modernity: Critical Concepts 2* (1999): 153–74.

² Joyce Burkhalter Flueckiger, "SABA MAHMOOD, Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005), 249.

budaya dan agama pada persimpangan membuat Bentuk kekuasaan yang diterapkan pada perempuan menjadi sangat kuat dan sulit digoyahkan. karena pandangan patriarki yang begitu kuat, dalam ajaran agama semuanya itu merupakan kehendak Tuhan dan sebuah norma adat yang telah berlaku dalam masyarakat.

Pemikir-pemikir feminis banyak yang membahas teori patriarki dalam dunia akademik dalam pandangan interseksional atau sebuah konsep yang mengakui deskriminasi terhadap gender tidak bekerja secara tunggal atau sendirian, tetapi merupakan perjumpaan struktur kuasa dalam sistem patriarki. Nilai-nilai hierarki ditanamkan berdasarkan simbol, ritual dan struktur adat dalam masyarakat; dan agama memberikan legitimasi keagamaan yang terasa sakral dan memberikan sebuah nilai transenden yang paling kuat dalam lingkup publik, ranah privat, dan spiritualitas.³ Memahami patriarki sebagai konstruksi kekuasaan yang berlapis-lapis membutuhkan pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini menggabungkan antropologi, teologi, dan studi gender untuk menjelaskan bagaimana budaya dan agama

bekerja sama membentuk ketidaksetaraan gender.

Sangat penting untuk diketahui wajah dari patriarki yang khas dalam konteks lokal. Di dalam masyarakat kepulauan, misalnya laki-laki memegang hak atas warisan serta memiliki hak untuk mengambil keputusan adat, sedangkan perempuan sering dibatasi dalam ruang domestik. Jika sistem ini bertemu maka perempuan akan mengalami marginalisasi ganda secara agama dan budaya. perempuan yang mencoba untuk melawan sistem ini akan di anggap sebagai Perempuan yang telah melawan norma adat yang berlaku dalam masyarakat dan melanggar kehendak Tuhan.⁴ Maka sistem patriarki yang bertemu dalam persimpangan budaya lokal dan agama menjelma sebagai sebuah struktur sosial, dan juga menjadi sebuah hegemoni yang memiliki kuasa untuk mengatur pola pikir dan perilaku dari masyarakat.

Perjumpaan antara budaya dan agama tidak selalu berjalan secara linear atau secara lurus. Tetapi jika dilihat dari sisi lain agama bisa menjadi korektor untuk mengoreksi budaya yang melakukan deskriminasi, begitupun sebaliknya, budaya

17.95 Paper,” *International Journal of Middle East Studies* 38, no. 2 (2006): 325–26.

³ Judith Butler and Gender Trouble, “Feminism and the Subversion of Identity,” *Gender Trouble* 3, no. 1 (1990): 3–17.

⁴ Sherry B Ortner, “Is Female to Male as Nature Is to Culture?,” *Feminist Studies* 1, no. 2 (1972): 5–31.

lokal dapat menyediakan ruang untuk ajaran agama dalam menafsir agama yang menciptakan keadilan gender. Tradisi yang dilakukan secara menyeluruh dalam masyarakat dapat membuka ruang bagi teks Agama untuk lebih inklusif. Akan tetapi usaha ini selalu terhambat oleh tafsir-tafsir tradisional yang telah mengakar kuat sejak lama. Maka ini membuka ruang bagi hermeneutik feminis untuk membongkar bias terhadap patriarki, baik didalam teks-teks keagamaan maupun tradisi budaya yang telah mengakar lama.⁵ Maka dengan itu pertemuan pada persimpangan antara budaya lokal dan agama bukan hanya menguatkan patriarki, tetapi menyediakan sebuah medan bagi resistensi dan transformasi sosial dalam masyarakat.

Patriarki dalam konteks agama dan budaya telah dilakukan penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yaitu Atabau (2025), dalam tulisannya menekankan bahwa doktrin dan tradisi dalam agama Kristen sering kali memberikan intervensi dalam bentuk penafsiran yang memperkuat peran gender hierarkis, sehingga membatasi ruang gerak dan kepemimpinan perempuan, terhadap praktik ketidakadilan terhadap

perempuan sehingga dapat memperkuat struktur patriarki yang telah lama mengakar dalam budaya lokal. Atabau dalam penelitiannya memperlihatkan realitas penindasan terhadap kitab suci dengan menggunakan studi feminis yang nantinya menawarkan pendekatan tafsir feminis terhadap kitab suci meskipun perjuangan feminis sendiri masih sering terjebak dengan kategori ras dan kelas yang membatasi agenda pembebasan bagi perempuan.⁶ Sejalan dengan hal ini ada penelitian yang dilakukan oleh Eleanor dan Supriyanto (2020) yang memperlihatkan Budaya patriarki di Indonesia tidak menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara. Sistem ini memberikan keistimewaan dan otoritas lebih besar kepada laki-laki, sementara perempuan berada dalam posisi yang lebih lemah dan terbatas dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan.⁷ Maka hasil penelitian persimpangan antara agama dan budaya tidak sekedar persoalan yang domestik atau tertutup melainkan sebuah masalah sosial yang bersifat struktural, historis, dan teologi.

⁵ Elisabeth Schüssler Fiorenza, “In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins,” 1983.

⁶ Paskalis Yuven Atabau, “Studi Feminis Dalam Agama: Melintas Batas Dan Mendobrak Tradisi Agama Patriarki,”

Sukacita: Jurnal Pendidikan Iman Kristen 2, no. 2 (2025): 92–106.

⁷ Fransiska Novita Eleanora and Edy Supriyanto, “Violence against Women and Patriarkhi Culture in Indonesia,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 9 (2020): 44–51.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pembentukan patriarki dalam persimpangan antara budaya lokal dan agama, beserta dampaknya terhadap perempuan. Interaksi antara budaya lokal dan agama serta implikasinya terhadap posisi perempuan dalam masyarakat. Interaksi ini mengacu pada persinggungan antara nilai-nilai budaya dan interpretasi agama yang memengaruhi, memperkuat, dan bekerja sama membentuk struktur patriarki yang berdampak pada kehidupan perempuan. Kebaruan penelitian ini hadir melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis antropologis, teologis, dan gender untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk legitimasi patriarki yang beroperasi secara simultan. Pendekatan ini menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya mengkaji satu aspek secara terpisah. Yang menjadi fokus utama dari penulisan ini Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teoretis, tetapi juga pada pengalaman konkret perempuan yang hidup dalam hegemoni patriarki. Pengalaman konkret ini ditunjukkan melalui analisis literatur yang mencakup studi kasus, temuan penelitian sebelumnya, dan narasi empiris tentang

praktik budaya dan interpretasi agama yang memengaruhi kehidupan perempuan. Dengan menggunakan metode studi literatur kualitatif, artikel ini menghimpun dan menafsirkan temuan empiris tersebut untuk menggambarkan bagaimana patriarki beroperasi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan interdisipliner yang digunakan dalam artikel ini mengacu pada metode penelitian yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu isu. Dalam konteks makalah ini, pendekatan ini mengintegrasikan perspektif antropologi, teologi, dan studi gender untuk menganalisis bagaimana budaya dan agama bekerja sama dalam membentuk dan mempertahankan struktur patriarki. Dengan menggabungkan ketiga disiplin ilmu ini, penelitian ini dapat memandang isu tersebut bukan dari satu perspektif tunggal, melainkan sebagai fenomena sosio-religius yang kompleks dan saling terkait.⁸ dalam kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi diskursus akademik tentang gender sekaligus menjadi refleksi kritis bagi masyarakat dan institusi keagamaan dalam membangun relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan supaya tidak terciptanya ketidaksetaraan gender.

METODE PENELITIAN

⁸ Nira Yuval-Davis, "Intersectionality and Feminist Politics," *European Journal of Women's Studies* 13, no. 3 (2006): 193–209.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis hubungan antara budaya patriarki lokal dan praktik keagamaan. Pendekatan literatur dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah teori, konsep, dan temuan sebelumnya yang relevan dengan topik, termasuk kajian tentang norma sosial, budaya patriarki, serta praktik keagamaan dan peran perempuan dalam komunitas. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen akademik, dan publikasi daring yang membahas budaya patriarki dan kaitannya dengan agama. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menelaah dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema, membandingkan pandangan para ahli, dan mengaitkan teori dengan konteks budaya lokal. Dengan metode ini, penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan kritis mengenai bagaimana budaya patriarki memengaruhi praktik keagamaan dan partisipasi perempuan dalam kehidupan komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN PATRIAKI

Istilah patriarki berasal dari kata "patriark", yang secara harfiah berarti "ayah" atau "bapak", dan merujuk pada sistem sosial di mana laki-laki menempati posisi dominan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga,

masyarakat, maupun institusi sosial lainnya. Dalam sistem ini, struktur kekuasaan cenderung memprioritaskan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama, sementara perempuan ditempatkan pada posisi subordinat yang seringkali membatasi kebebasan bergerak, hak, dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Secara historis, patriarki terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan konstruksi sosial, budaya, dan agama yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi hingga dianggap normal atau alami. Sistem ini tidak hanya memengaruhi relasi gender dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga membentuk perspektif masyarakat tentang peran laki-laki dan perempuan, sehingga melanggengkan ketimpangan yang sulit diubah tanpa upaya kritis dan kesadaran kolektif untuk melawannya.

Demikian pula, dalam struktur patriarki, laki-laki diposisikan sebagai pusat kekuasaan, yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, dari ranah domestik hingga ranah publik. Dalam konteks keluarga, laki-laki dipandang sebagai pemimpin utama dengan otoritas pengambilan keputusan tertinggi, baik yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, maupun moral. Posisi ini tidak hanya menempatkan laki-laki pada posisi dominan tetapi juga menciptakan ketimpangan relasional yang mengabaikan suara dan

pengalaman perempuan. Pada tataran sosial-budaya yang lebih luas, struktur ini diperkuat oleh nilai-nilai tradisional, norma adat, dan interpretasi agama tertentu yang semakin memperkuat legitimasi kekuasaan laki-laki. Akibatnya, relasi gender yang dihasilkan tidak setara, melainkan bergerak dalam pola hierarkis yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam banyak aspek kehidupan.

Sementara itu perempuan sering diposisikan dengan peran sebagai pendukung yang berfungsi untuk melengkapi, melayani, dan mengurus kebutuhan domestik atau kebutuhan rumah tangga. Sehingga hal ini menyebabkan adanya pembagian peran yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki lebih banyak menguasai ruang publik atau ruang-ruang umum sedangkan perempuan didorong untuk tetap berada di ranah domestik atau ruang-ruang yang tertutup. Nurmila (2015) menekankan bahwa patriarki tidak hanya hadir dalam kehidupan keluarga saja tetapi juga menebus sampai kepada lapisan budaya, ekonomi, politik, serta tafsir agama yang kemudian memperkuat dominasi laki-laki terhadap perempuan.⁹ Sistem patriarki ini telah mengakar begitu kuat dalam masyarakat sehingga masyarakat hampir

secara keseluruhan di Indonesia, peran laki-laki dianggap lebih sah dan wajar untuk memimpin. pemahaman ini terus diwariskan secara turun-temurun sehingga patriarki di persepsi bukan sebagai hasil konstruksi budaya melainkan sebagai kuadrat yang seakan-akan tidak bisa diganggu gugat. Pandangan-pandangan seperti ini membuat relasi antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak setara atau tidak seimbang, karena kekuasaan hanya berpusat pada laki-laki. Padahal secara hakikat baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki kapasitas yang sama berperan dalam ruang publik maupun ruang privat. Akan tetapi, tafsir budaya dan agama yang masih bias akhirnya memperkuat patriarki untuk menutupi kenyataan dan menjadikannya seolah-olah ini merupakan kebenaran mutlak yang harus diterima oleh masyarakat tanpa dikritik.

Dalam kalangan masyarakat patriarki, laki-laki dipandang sebagai pewaris garis keturunan, penjaga nama baik keluarga, sekaligus sebuah figur yang bertugas untuk melindungi dan mengendalikan keluarganya. Sedangkan untuk perempuan sebaliknya diposisikan pada posisi subordinat, sehingga perempuan dianggap lebih lemah, emosional, dan kurang rasional sehingga

⁹ Nina Nurmila, "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya," *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 23, no. 1 (2015): 1–16.

tidak layak untuk diberikan tanggung jawab besar di ranah publik atau ranah umum. Pandangan seperti ini tidak hanya mengikat pada level keluarga tetapi juga lebih meluas dalam tatanan sosial yang kompleks termasuk di dalamnya yaitu adat, hukum, dan lembaga keagamaan. Akhirnya, ketidakadilan yang muncul dari struktur patriarki terhadap gender yang nyata, seperti keterbatasan perempuan untuk memperoleh pendidikan setara, menduduki posisi kepemimpinan, atau ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Nurmila (2015) menunjukkan sistem patriarki bahkan memiliki pengaruh yang besar pada cara teks agama ditafsirkan, di mana tafsir agama seringkali bias gender karena mengutamakan laki-laki daripada perempuan.¹⁰ Maka dengan itu patriarki bukan hanya sebuah sistem sosial, melainkan juga sebuah ideologi yang membentuk cara pandang, perilaku, dan kebijakan publik terhadap gender. Patriarki menjadi sebuah kerangka berpikir yang menormalisasikan kekuasaan laki-laki sekaligus melanggengkan ketidakadilan yang dialami pada perempuan. Untuk itu sangat penting membedakan aspek biologis yang memang kuadrati dengan peran gender yang sebenarnya merupakan konstruksi

sosial. Perbedaan ini membuka ruang bagi kesadaran bawah patriarki merupakan rekonstruksi budaya yang bisa dikritisi dan diubah bukan sebuah takdir atau kuadrat yang tidak bisa diganggu gugat.

2. BUDAYA LOKAL DAN PATRIARKI

Secara terminologis, budaya lokal dapat dipahami sebagai seperangkat nilai, norma, kepercayaan, praktik, dan simbol yang berkembang dan diwariskan dalam suatu komunitas tertentu, dan menjadi identitas khas kelompok tersebut. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa budaya lokal mencakup gagasan, kegiatan, dan karya manusia yang terhubung dengan adat istiadat dan cara hidup suatu masyarakat tertentu.¹¹ Clifford Geertz juga menekankan bahwa budaya adalah sistem makna yang dianut bersama dan diwujudkan melalui tindakan simbolis, seperti ritual, adat istiadat, dan praktik sosial, yang memungkinkan suatu komunitas memahami realitas sosialnya.¹² Sementara itu, Haviland menyatakan bahwa budaya lokal adalah pola kehidupan yang dianut bersama, dipelajari, dan diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga menciptakan struktur sosial yang khas.¹³ Dengan demikian, budaya lokal bukan sekadar kumpulan tradisi, tetapi sistem makna yang membentuk cara berpikir,

¹⁰ Nurmila.

¹¹ Koentjaraningrat Koentjaraningrat, "Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi PT," Rineka Cipta: Jakarta 144 (2009).

¹² Clifford Geertz, "The Interpretation of Cultures New York," NY: Basic Books, 1973.

¹³ William A Haviland, "Cultural Anthropology," 1996.

bertindak, dan berhubungan dalam kehidupan bermasyarakat.

Budaya lokal dalam banyak masyarakat sering menjadi ruang reproduksi atau ruang berkembangnya nilai-nilai yang menguatkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. misalnya, dalam adat perkawinan perempuan selalu dipandang sebagai pihak yang “diberikan” dari satu keluarga ke keluarga yang lain, sementara laki-laki sering dianggap sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk “mengambil” atau “membawa” perempuan masuk ke dalam garis keturunannya. Dalam banyak sistem budaya, perempuan seringkali diposisikan sebagai objek pertukaran sosial, alih-alih sebagai subjek yang memiliki kebebasan penuh untuk menentukan diri dan pilihan hidupnya. Pertukaran ini berujung pada lahirnya relasi kuasa yang timpang, karena perempuan diperlakukan sebagai bagian dari mekanisme sosial untuk mempererat aliansi, mempertahankan status keluarga, atau memperkuat hubungan antarkelompok. Akibatnya, perempuan menjadi subordinat karena nilai mereka diukur melalui fungsi sosial yang ditetapkan masyarakat, alih-alih melalui kapasitas dan otonomi pribadi mereka. Dalam beberapa tradisi, praktik seperti pemberian mas kawin semakin memperkuat konstruksi ini, karena mas

kawin dipahami bukan sekadar simbol penghargaan, tetapi sering kali diperlakukan sebagai “harga” yang dibayarkan untuk mendapatkan seorang perempuan, sehingga secara simbolis memposisikan perempuan sebagai komoditas yang dapat “dipertukarkan” dalam sistem sosial. Struktur pertukaran ini pada akhirnya menormalkan ketimpangan gender dan membatasi ruang perempuan untuk menentukan hidupnya sendiri.

Sistem patriarki memperkuat posisi perempuan sebagai komoditas yang nilainya itu dapat ditakar melalui harta benda walaupun sering dibela sebagai bagian dari identitas budaya, praktik semacam ini tidak bisa dilepas pisahkan dari struktur patriarki yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat tradisional, di mana perempuan ditempatkan pada posisi subordinat dibandingkan dengan laki-laki.¹⁴ Hal ini sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Sylvia Walby, patriarki bekerja melalui sebuah struktur dalam rumah tangga, hubungan kerja, dan budaya, di mana memperlihatkan perempuan di posisikan dalam posisi subordinat sejak dari keluarga hingga ke komunitas yang lebih luas.¹⁵

Bukan saja dalam adat perkawinan, patriarki juga tampak nyata dalam sistem

¹⁴ Nurmila, “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya.”

¹⁵ Walby, “Theorizing Patriarchy.”

pewarisan. Dalam banyak budaya lokal, terutama yang menganut kepercayaan sistem patrilineal, hanya laki-laki yang bisa diakui sebagai pewaris sah baik dalam hal harta benda maupun garis keturunan.¹⁶. Perempuan jarang sekali mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki untuk menjadi ahli waris, bahkan seringkali dianggap sebagai pihak yang keluar dari keluarga setelah menikah. akibatnya, perempuan tidak memiliki kendali atas sumber daya ekonomi keluarga, yang secara otomatis memperkuat ketergantungan mereka kepada laki-laki. Sistem Patriarki ini kemudian memperkuat struktur sosial dimana laki-laki dilihat sebagai pemegang kekuasaan utama dalam menjaga kehormatan keluarga maupun untuk meneruskan garis keturunan keadaan ini juga memperlihatkan betapa kuatnya budaya lokal, melalui aturan pewarisan, serta meneguhkan posisi laki-laki sebagai pusat dari kekuasaan.

Budaya patriarki juga mengakui kepemimpinan tradisional yang hampir selalu dipegang oleh laki-laki. Dalam struktur adat kepala suku, raja, atau pengangkut adat biasanya adalah laki-laki yang telah dianggap memiliki kekuatan untuk melindungi komunitas. Perempuan jarang diberi ruang untuk mengambil posisi sebagai pemimpin, bahkan ketika mereka memiliki kemampuan atau skill serta

pengetahuan yang tinggi. Keadaan ini tidak hanya terjadi di suatu daerah, melainkan meluas di berbagai masyarakat nusantara ideologi Patriarki ini juga melekat dalam budaya lokal menegaskan bahwa kepemimpinan publik merupakan laki-laki, sedangkan perempuan diharapkan mengambil peran di ruang domestik atau ruang-ruang yang tertutup.¹⁷. Penetapan ini sudah membatasi perempuan yang memiliki potensi dalam ranah sosial politik, sekaligus telah memelihara pandangan dalam masyarakat bawah perempuan tidak layak untuk memimpin.

Sistem nilai Patriarki lokal hidup dan dikonstruksikan oleh budaya lokal dan memberikan dukungan terhadap posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan memiliki kekuasaan penuh untuk mengambil keputusan dalam keluarga. Banyaknya ungkapan dan pandangan yang berkembang di masyarakat, seperti anggapan bahwa laki-laki adalah “kepala keluarga” yang memegang keputusan tertinggi, atau anggapan bahwa perempuan adalah “pengurus rumah tangga” yang tugas utamanya melayani dan menaati suami, secara tidak langsung menegaskan struktur hierarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas dan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk pada arahan laki-laki. dalam masyarakat tradisional, pengambilan keputusan yang

¹⁶ Walby.

¹⁷ Walby.

sangat penting terkait dengan ekonomi keluarga, pendidikan anak, atau urusan adat biasanya dilakukan oleh laki-laki bukan perempuan titik karena perempuan seringkali dianggap sebagai yang lemah dan tidak memiliki kapasitas secara rasional yang sama untuk menentukan hal-hal besar dalam kehidupan keluarga maupun Masyarakat.¹⁸ bahkan ketika perempuan memiliki pendapat yang berbeda, suara mereka sering tidak dipedulikan atau tidak dianggap karena mereka tidak memiliki otoritas. Dominasi simbolik yang ada dalam Patriarki lokal telah menguatkan hierarki gender yang sudah ada sejak lama.

Budaya Patriaki ini memberikan dampak yang sangat terasa kepada perempuan, baik di ruang domestik yang privat maupun publik. Di ruang domestik perempuan diikat oleh norma yang menempatkan mereka sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh anak, dan penyedia layanan bagi suami. Tugas-tugas seperti ini seringkali dipandang sebagai sebuah kuadrat yang tidak bisa ditawar atau diganggu gugat titik akibatnya, perempuan memiliki beban kerja yang ganda karena mereka juga harus mencari nafkah di luar

rumah di ruang publik kesempatan untuk perempuan berpartisipasi dalam pendidikan politik, atau ekonomi, sering terhambat oleh nilai-nilai budaya yang sudah menganggap ruang tersebut sebagai milik laki-laki.¹⁹. Ketidaksetaraan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan membuat perempuan sulit untuk mencapai posisi yang strategis dalam masyarakat, meskipun perempuan memiliki potensi dan kapasitas yang sama atau bahkan lebih dari laki-laki.

Perlu untuk diketahui bahwa budaya lokal tidak hanya statis. perempuan dalam berbagai komunitas mulai melakukan negosiasi terhadap nilai-nilai patriakal. Ada yang melawan secara langsung dengan menuntut hak yang setara dalam warisan, ada pula yang secara simbolik memperluas peran mereka di ruang publik meski tetap dalam bingkai budaya adat titik gerakan perempuan lokal juga memanfaatkan tafsir budaya yang lebih egaliter untuk menegaskan eksistensi mereka sebagai perempuan.²⁰. Artinya bahwa budaya lokal memang bisa menjadi ruang reproduksi atau ruang berkembangnya budaya patriaki lokal, tetapi juga membuka ruang yang berpotensi sebagai transformasi nilai-nilai

¹⁸ M Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977* (Knopf Doubleday Publishing Group, 1980), https://books.google.co.id/books?id=Aqf309sk_EsC.

¹⁹ Kimberlé Williams Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics,

and Violence against Women of Color,” in *The Public Nature of Private Violence* (Routledge, 2013), 93–118.

²⁰ Nurmila, “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya.”

yang dapat ditafsir ulang dalam kerangka kesetaraan gender.

3. AGAMA DAN PATRIARKI

Agama dalam banyak masyarakat dipahami sebagai sumber nilai dan norma yang mengarahkan kehidupan manusia. Namun, dalam kenyataan sosial, agama juga kerap menjadi ruang di mana patriarki mengakar dan diperkuat. Hal ini terlihat dari tafsir keagamaan yang sering menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Misalnya, dalam beberapa tafsir tradisional, perempuan dipandang sebagai pihak yang harus tunduk dan patuh sepenuhnya kepada laki-laki, sehingga otoritas mereka dalam mengambil keputusan menjadi sangat terbatas.²¹ Dengan dalih menjaga harmoni rumah tangga atau komunitas, tafsir semacam ini justru melegitimasi subordinasi perempuan. Padahal, jika dilihat dari teks-teks suci, banyak nilai yang sejatinya mendorong kesetaraan dan penghargaan terhadap martabat perempuan.

Perbedaan antara teks suci dan tafsir tradisional menjadi penting untuk digarisbawahi. Teks suci dalam agama sering kali bersifat terbuka, sehingga dapat ditafsirkan dengan berbagai perspektif, termasuk perspektif yang membebaskan

perempuan dari struktur patriarki. Akan tetapi, tafsir yang berkembang di masyarakat biasanya lahir dari para pemimpin agama yang hidup dalam konteks budaya patriarkal.²² Dengan menggunakan teori Michel Foucault, praktik tafsir ini dapat dilihat sebagai bagian dari produksi wacana yang membentuk “kebenaran” sosial bahwa laki-laki adalah pemimpin alami.²³ Khotbah, doa, dan liturgi menjadi sarana disiplin yang membentuk perilaku perempuan agar sesuai dengan standar patriarkal. Dalam hal ini, kuasa agama tidak hanya bersifat transenden, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memelihara dominasi laki-laki. Akibatnya, tafsir tersebut lebih sering mencerminkan pandangan sosial-budaya yang menempatkan laki-laki di atas perempuan. Dalam banyak kasus, tafsir tradisional lebih dipengaruhi oleh sistem nilai lokal yang patriarkal daripada oleh pesan egaliter dari teks suci itu sendiri. Hal ini menyebabkan agama seakan-akan mendukung dominasi laki-laki, padahal yang sebenarnya terjadi adalah dominasi tafsir tertentu. Institusi agama memiliki peran besar dalam melanggengkan ataupun menantang patriarki. Sebagai lembaga yang memegang otoritas atas tafsir teks suci, institusi agama bisa memilih apakah akan mempertahankan tradisi patriarkal atau membuka ruang bagi reinterpretasi yang

²¹ Nurmila.

²² Nurmila.

²³ Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*, 1972-1977.

lebih setara.²⁴ Sayangnya, banyak institusi agama yang masih konservatif dan cenderung mempertahankan pola tafsir lama yang mengekang perempuan. Misalnya, pembatasan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam komunitas atau larangan bagi perempuan untuk memegang posisi tertentu sering dibenarkan dengan alasan teologis. Pola semacam ini membuat agama berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memelihara dominasi laki-laki.

Namun, tidak semua tafsir dan institusi agama bergerak dalam arah yang sama. Ada juga gerakan dari dalam agama sendiri yang mencoba menantang struktur patriarki. Para teolog feminis, misalnya, melakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks suci untuk menunjukkan bahwa ajaran agama sejatinya tidak menempatkan perempuan sebagai subordinat.²⁵ Tafsir yang lebih inklusif ini melihat perempuan sebagai mitra sejajar dalam keluarga, masyarakat, dan bahkan dalam pelayanan keagamaan. Beberapa institusi agama modern juga mulai membuka kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan, baik dalam konteks spiritual maupun sosial. Dengan cara ini, agama tidak lagi sekadar

memperkuat patriarki, tetapi dapat menjadi kekuatan transformatif bagi kesetaraan gender. Di sisi lain, resistensi perempuan terhadap tafsir patriarkal sering muncul dalam bentuk gerakan komunitas yang memadukan kesadaran keagamaan dengan perjuangan sosial. Perempuan tidak hanya menerima tafsir dominan, tetapi juga aktif menafsirkan ulang teks suci sesuai dengan pengalaman mereka. Hal ini sejalan dengan pendekatan hermeneutik feminis yang berusaha “mendengar suara perempuan” di dalam teks maupun sejarah.²⁶ Dengan demikian, agama menjadi arena perdebatan, di mana kuasa laki-laki dan upaya pembebasan perempuan saling berhadapan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa patriarki dalam agama bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan bisa digugat dan ditafsir ulang.

Namun, agama memiliki wajah ganda dalam hubungannya dengan patriarki. Di satu sisi, agama melalui tafsir tradisional dan institusi konservatif dapat menjadi legitimasi kuat bagi dominasi laki-laki. Namun di sisi lain, teks suci yang terbuka dan gerakan reinterpretasi dari kalangan teolog maupun aktivis perempuan menawarkan potensi besar untuk melawan patriarki.²⁷ Oleh karena itu, pembacaan

²⁴ Foucault.

²⁵ Fiorenza, “In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins.”

²⁶ Letty M Russell, *Feminist Interpretation of the Bible* (Westminster John Knox Press, 1985).

²⁷ Walby, “Theorizing Patriarchy.”

kritis terhadap teks dan sikap terbuka institusi agama terhadap tafsir baru sangat dibutuhkan agar agama benar-benar menjadi sumber keadilan, bukan alat penindasan. Dengan kesadaran ini, agama bisa berfungsi sebagai kekuatan moral yang membebaskan perempuan dari belenggu patriarki, sekaligus membangun tatanan sosial yang lebih setara.

4. PERSIMPANGAN BUDAYA DAN AGAMA

Persimpangan budaya dan agama sering kali menciptakan struktur patriarki yang lebih kokoh dibandingkan jika keduanya berdiri sendiri. Budaya lokal, dengan sistem nilai yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas, mendapatkan legitimasi lebih kuat ketika dipadukan dengan ajaran agama yang ditafsirkan secara patriarkal. Dalam konteks ini, norma adat tidak hanya didukung oleh tradisi, tetapi juga mendapat “pembenaran suci” melalui tafsir keagamaan.²⁸ Akibatnya, struktur patriarki seolah tidak bisa diganggu gugat karena dianggap memiliki dasar ganda: tradisi leluhur sekaligus wahyu ilahi. Hal ini membuat perempuan berada pada posisi yang sulit untuk menggugat, sebab perlawanan

terhadap sistem tersebut dipersepsikan bukan hanya sebagai penolakan terhadap adat, tetapi juga terhadap agama. Di sinilah teori intersectionality dari Kimberlé Crenshaw menjadi penting, karena memperlihatkan bagaimana perempuan mengalami diskriminasi berlapis ketika dua sumber kuasa bertemu.²⁹ Misalnya, perempuan adat yang berasal dari kelas ekonomi rendah akan lebih sulit melakukan perlawanan, dibandingkan perempuan dari kelompok sosial yang lebih kuat. Dengan demikian, pengalaman perempuan tidak tunggal, melainkan dipengaruhi oleh kelas, status perkawinan, dan konteks sosial-religius mereka.³⁰

Ketika praktik ini kemudian dilegitimasi oleh agama, maka perempuan semakin dipandang sebagai objek pertukaran, bukan sebagai subjek yang bebas memilih. Upacara adat yang sebelumnya bersifat kultural diperkuat dengan doa atau ritual keagamaan sehingga status perempuan sebagai “milik” keluarga laki-laki semakin dilembagakan. Dengan demikian, posisi laki-laki sebagai kepala keluarga tidak hanya dijaga oleh aturan adat, tetapi juga oleh simbol-simbol keagamaan yang memberi bobot moral dan spiritual. Hal serupa terjadi dalam sistem

²⁸ Nurmila, “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya.”

²⁹ Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color.”

³⁰ Nurmila, “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya.”

pewarisan. Dalam masyarakat patrilineal, adat hanya mengakui laki-laki sebagai ahli waris utama, sementara perempuan dianggap keluar dari garis keturunan setelah menikah. Ketika aturan adat ini kemudian diperkuat dengan tafsir keagamaan yang menekankan laki-laki sebagai pemimpin dan penanggung jawab keluarga, maka penyingkiran perempuan dari hak waris dianggap wajar bahkan sah secara religius.³¹. Akibatnya, perempuan kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan semakin terperangkap dalam ketergantungan kepada laki-laki. Dalam konteks ini, agama tidak hanya membiarkan praktik patriarkal adat berlangsung, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme legitimasi moral yang membuat perempuan sulit menuntut kesetaraan.

Dalam persimpangan budaya dan agama ini, perempuan sering kali menjadi objek “ganda” kuasa. Mereka harus tunduk pada norma adat yang menuntut kepatuhan kepada laki-laki, sekaligus terikat pada norma agama yang menekankan hal serupa.³². Tekanan ini menciptakan situasi di mana ruang gerak perempuan sangat terbatas, baik di dalam keluarga maupun masyarakat luas. Ketika mereka mencoba keluar dari struktur tersebut, mereka sering mendapat stigma sebagai pelanggar adat sekaligus pendosa secara religius. Kondisi

ini menjadikan pengalaman perempuan jauh lebih kompleks, karena bentuk penindasan yang mereka hadapi tidak datang dari satu sumber, melainkan dari dua sumber kuasa yang saling menguatkan. Namun, perlu disadari bahwa pertemuan budaya dan agama tidak selalu hanya menghasilkan penindasan. Dalam beberapa konteks, perempuan justru mampu menegosiasikan posisi mereka melalui reinterpretasi adat maupun teks agama. Misalnya, ada komunitas yang mulai menafsirkan ulang makna belis bukan sebagai “harga” perempuan, tetapi sebagai simbol penghargaan terhadap keluarga perempuan.³³. Demikian pula, sejumlah tokoh agama berusaha mengangkat tafsir yang lebih egaliter terhadap ayat-ayat keagamaan yang selama ini digunakan untuk menjustifikasi dominasi laki-laki. Dengan cara ini, persimpangan antara budaya dan agama bisa menjadi ruang transformatif, bukan hanya ruang penindasan.

Patriarki dalam titik persimpangan budaya dan agama menghasilkan struktur patriarki yang lebih kuat karena masing-masing saling memberi legitimasi. Perempuan dalam sistem ini menjadi objek kuasa ganda: adat yang mengikat secara sosial, dan agama yang mengikat secara

³¹ Nurmila.

³² Kimberle Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and

Violence Against,” *The Legal Response to Violence Against Women* 5 (1997): 91.

³³ Russell, *Feminist Interpretation of the Bible*.

spiritual.³⁴ Akan tetapi, persimpangan ini juga menyimpan potensi perubahan jika tafsir agama dan nilai budaya dikritisi dan ditafsir ulang dalam kerangka kesetaraan gender. Oleh karena itu, kesadaran kritis diperlukan agar budaya dan agama tidak hanya menjadi instrumen pelanggengan patriarki, tetapi juga menjadi sarana pembebasan dan pengakuan martabat perempuan.

5. PERLAWANAN DAN RUANG NEGOSIASI

Banyak anggapan yang menempatkan perempuan hanya sebagai pihak pasif dalam sistem patriarki, baik dalam budaya lokal maupun tafsir agama. Padahal, sejarah gereja dan kehidupan jemaat menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki ruang untuk melawan dan menegosiasikan ulang posisi mereka. Dalam konteks Kristen, perempuan sering menggunakan iman mereka untuk meneguhkan martabatnya sebagai gambar Allah (Imago Dei) yang setara dengan laki-laki (Kejadian 1:27). Dengan demikian, meskipun berhadapan dengan dominasi laki-laki, perempuan bukan sekadar objek, melainkan subjek aktif yang terus mencari jalan untuk mendobrak struktur yang membatasi.³⁵ Salah satu bentuk perlawanan

nyata adalah melalui reinterpretasi Kitab Suci. Teologi feminis Kristen menegaskan bahwa Alkitab harus dibaca dengan hermeneutik kecurigaan, yaitu curiga terhadap tafsir yang diwariskan tradisi patriarki, sekaligus dengan hermeneutik pengharapan, yaitu membaca Alkitab sebagai kabar baik bagi semua manusia, termasuk perempuan.³⁶ Tokoh seperti Elisabeth Schüssler Fiorenza, misalnya, menekankan pentingnya membaca Perjanjian Baru sebagai sejarah komunitas yang juga memberi tempat bagi perempuan, walaupun sering dihapus oleh tafsir patriarkal.³⁷ Dengan cara ini, perempuan Kristen menunjukkan bahwa iman tidak harus tunduk pada struktur patriarki, tetapi justru bisa menjadi sumber pembebasan.

Selain reinterpretasi Kitab Suci, ruang adat juga sering menjadi arena negosiasi. Dalam budaya lokal yang masih kuat patriarkinya, perempuan menggunakan peran simbolis mereka, misalnya sebagai pengasuh kehidupan, penjaga rumah, atau bahkan sebagai pemimpin dalam pelayanan gereja tingkat lokal. Dalam banyak jemaat di Maluku, perempuan berperan penting sebagai penggerak liturgi, pengajar sekolah minggu, maupun pemimpin doa. Walaupun jabatan formal gereja sering kali didominasi laki-laki, perempuan tetap menemukan

³⁴ Fiorenza, “In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins.”

³⁵ Walby, “Theorizing Patriarchy.”

³⁶ Fiorenza, “In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins.”

³⁷ Fiorenza.

ruang resistensi dengan menghidupi panggilan imannya melalui pelayanan yang memengaruhi kehidupan komunitas.³⁸

Gerakan sosial gerejawi juga menjadi wujud konkret perlawanan perempuan terhadap patriarki. Organisasi perempuan gereja seperti Persekutuan Kaum Ibu di GPM atau gerakan perempuan Kristen di tingkat nasional, aktif memperjuangkan hak-hak perempuan baik di ranah domestik maupun publik. Mereka melawan pemahaman bahwa perempuan hanya berfungsi sebagai pendukung laki-laki, dengan cara memperlihatkan bahwa pelayanan gereja, pendidikan iman, bahkan pembangunan masyarakat, tidak mungkin berjalan tanpa kontribusi perempuan.³⁹ Perlawanan ini tidak selalu bersifat konfrontatif, tetapi melalui pelayanan nyata yang secara perlahan mengubah cara pandang jemaat terhadap posisi perempuan. Contoh nyata dapat dilihat dari tokoh-tokoh Kristen seperti Letty M. Russell, seorang teolog feminis yang menekankan pentingnya gereja sebagai komunitas inklusif, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi mitra dalam pelayanan.⁴⁰ Demikian juga di konteks Indonesia, perempuan-perempuan Kristen dalam pelayanan misi atau pendidikan

teologi mulai menyuarakan tafsir baru yang menegaskan kesetaraan. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa iman Kristen tidak hanya bisa dipakai untuk melanggengkan patriarki, tetapi juga untuk membongkar struktur kuasa yang menindas.

Dengan demikian, perlawanan perempuan dalam konteks Kristen memperlihatkan bahwa mereka tidak pernah benar-benar pasif. Melalui tafsir ulang Alkitab, keterlibatan aktif dalam budaya lokal, maupun gerakan sosial gerejawi, perempuan berhasil membuka ruang negosiasi di tengah tekanan patriarki.⁴¹ Budaya lokal dan agama, yang awalnya menjadi instrumen penindasan, justru dapat diubah menjadi ruang emansipasi apabila ditafsirkan ulang secara kritis dan dijalani dengan iman. Perlawanan ini membuktikan bahwa perempuan Kristen bukan hanya objek patriarki, melainkan agen pembaruan dalam masyarakat dan gereja.

6. IMPLIKASI TEOLOGIS DAN SOSIAL

1. Implikasi Teologis

Dari sisi teologi, salah satu implikasi penting adalah perlunya pendekatan baru dalam membaca Kitab Suci dan tradisi gereja. Hermeneutik kecurigaan mengajak

³⁸ F S Adeney, *Christian Women in Indonesia: A Narrative Study of Gender and Religion*, Women and Gender in Religion (Syracuse University Press, 2003), <https://books.google.co.id/books?id=kiQ1rNpg17QC>.

³⁹ Nurmila, “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya.”

⁴⁰ Russell, *Feminist Interpretation of the Bible*.

⁴¹ Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*, 1972-1977.

kita untuk waspada terhadap tafsir Alkitab yang diwariskan oleh struktur patriarki dan seringkali mereduksi peran perempuan. Tafsir tradisional yang bias gender harus dibongkar, agar teks-teks Alkitab dapat dihidupkan kembali sebagai kabar baik yang inklusif. Di sisi lain, hermeneutik pengenangan menempatkan kembali perempuan dalam sejarah keselamatan yang selama ini dihapus atau dilupakan. Elisabeth Schüssler Fiorenza, misalnya, menunjukkan bahwa perempuan sejak awal telah berperan penting dalam pelayanan Yesus dan kehidupan jemaat perdana, tetapi suara mereka dikaburkan oleh tradisi tafsir patriarkal. Implikasi teologis ini menuntut gereja untuk melakukan refleksi ulang, agar iman Kristen tidak dipakai sebagai legitimasi ketidaksetaraan, tetapi sebagai dasar teologis bagi kesetaraan, keadilan, dan pembebasan.

2. Implikasi Sosial

Dari sisi sosial, implikasinya adalah membangun relasi yang lebih setara dengan memanfaatkan kekuatan budaya lokal dan agama secara positif. Budaya dan agama yang selama ini sering dipakai sebagai alat dominasi justru dapat diubah menjadi ruang pemberdayaan apabila ditafsirkan ulang secara kritis. Misalnya, dalam adat masyarakat Maluku, nilai pela gandong yang menekankan persaudaraan dapat dipakai sebagai dasar untuk menegaskan kesetaraan perempuan dan laki-laki.

Demikian juga, peran perempuan dalam pelayanan gereja dapat menjadi bukti bahwa mereka bukan hanya pendukung, tetapi mitra sejajar dalam membangun komunitas. Kesadaran kritis inilah yang diperlukan, agar budaya dan agama tidak lagi berfungsi sebagai penindas, melainkan menjadi sarana untuk memperjuangkan keadilan sosial dan pembebasan, baik di ranah domestik maupun publik.

KESIMPULAN

Patriarki yang bertemu di persimpangan: relasi antara budaya lokal dan agama dalam Membentuk Kuasa atas Perempuan menegaskan bahwa patriarki tidak hanya dipertahankan melalui budaya dan agama lokal secara terpisah, tetapi juga melalui cara keduanya berinteraksi dan menghasilkan bentuk-bentuk dominasi baru yang lebih halus dan sulit dikenali. Kebaruan makalah ini terletak pada penjelasan bagaimana kolaborasi budaya dan agama tidak hanya memperkuat patriarki, tetapi juga menciptakan legitimasi moral dan simbolis yang membuat perempuan menerima ketidaksetaraan sebagai sesuatu yang normal. Analisis ini menunjukkan bahwa relasi budaya-agama membentuk pola dominasi yang dinamis, berubah sesuai konteks sosial, dan terus-menerus direproduksi melalui praktik sehari-hari, sehingga membuka ruang bagi pembacaan kritis baru untuk membongkar struktur-struktur ini dan menawarkan strategi yang lebih kontekstual bagi pembebasan perempuan. Relasi keduanya membuat struktur patriarki menjadi lebih kokoh karena mendapatkan legitimasi ganda: dari adat yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan pewaris utama, serta dari tafsir agama yang sering menuntut perempuan tunduk pada otoritas laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan kritik tajam dan

reinterpretasi yang berani terhadap budaya maupun tradisi keagamaan, agar kuasa patriarki tidak terus-menerus direproduksi dalam kehidupan sosial maupun spiritual. Budaya dan agama seharusnya tidak dijadikan alat dominasi, melainkan harus ditafsirkan kembali sebagai sarana pembebasan yang meneguhkan martabat manusia secara setara. Dengan kesadaran kritis ini, masyarakat dapat membangun pola relasi baru yang lebih adil, inklusif, dan membebaskan, di mana perempuan tidak lagi ditempatkan di pinggiran, tetapi diakui sebagai mitra sejajar dalam kehidupan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeney, F S. *Christian Women in Indonesia: A Narrative Study of Gender and Religion*. Women and Gender in Religion. Syracuse University Press, 2003. https://books.google.co.id/books?id=k_iQ1rNpg17QC.
- Atabau, Paskalis Yuven. "Studi Feminis Dalam Agama: Melintas Batas Dan Mendobrak Tradisi Agama Patriarki." *Sukacita: Jurnal Pendidikan Iman Kristen* 2, no. 2 (2025): 92–106.
- Butler, Judith, and Gender Trouble. "Feminism and the Subversion of Identity." *Gender Trouble* 3, no. 1 (1990): 3–17.
- Crenshaw, Kimberle. "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against." *The Legal Response to Violence Against Women* 5 (1997): 91.
- Crenshaw, Kimberlé Williams. "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color." In *The Public Nature of Private Violence*, 93–118. Routledge, 2013.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Edy Supriyanto. "Violence against Women and Patriarkhi Culture in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 9 (2020): 44–51.
- Fiorenza, Elisabeth Schüssler. "In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins," 1983.
- Flueckiger, Joyce Burkhalter. "SABA MAHMOOD, Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005). Pp. 249. 17.95 Paper." *International Journal of Middle East Studies* 38, no. 2 (2006): 325–26.
- Foucault, M. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*. Knopf Doubleday Publishing Group, 1980. https://books.google.co.id/books?id=Aqf309sk_EsC.
- Geertz, Clifford. "The Interpretation of Cultures New York." NY: Basic Books, 1973.
- Haviland, William A. "Cultural Anthropology." (No Title), 1996.
- Koentjaraningrat, Koentjaraningrat. "Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi PT." *Rineka Cipta: Jakarta* 144 (2009).
- Nurmila, Nina. "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya." *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 23, no. 1 (2015): 1–16.
- Ortner, Sherry B. "Is Female to Male as Nature Is to Culture?" *Feminist Studies* 1, no. 2 (1972): 5–31.
- Russell, Letty M. *Feminist Interpretation of the Bible*. Westminster John Knox Press, 1985.
- Walby, Sylvia. "Theorizing Patriarchy." *Modernity: Critical Concepts* 2 (1999): 153–74.
- Yuval-Davis, Nira. "Intersectionality and Feminist Politics." *European Journal of Women's Studies* 13, no. 3 (2006): 193–209.

